

ABSTRAK

Ahmad Muhaymin. *Peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada Kalsel 2020 Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).* Skripsi, Pembimbing Ergina Faralita S.H., M.H pada Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah). Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Peran Bawaslu Kalsel, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Pilkada Kalsel 2020, Masa Covid 19.

Bawaslu Kalsel merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum ditingkat provinsi tugas dan wewenangnya diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada tahun 2020 pemerintah melaksanakan pemilihan kepala daerah dan Bawaslu Provinsi Kalsel menjadi lembaga yang mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020. Pada Tahun 2020 juga terjadi wabah virus yang melanda dunia yaitu penyebaran virus corona atau yang di sebut Covid 19. dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan harus menjalankan perannya dimasa Covid 19. dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian dengan hasil dalam bentuk data deskriptif analitis.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama, peran Bawaslu Provinsi Kalsel dalam menjalankan perannya terkait peningkatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah Kalimantan Selatan 2020 sudah maksimal dengan menjalankan program tentang pengawasan partisipatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah Kalimantan Selatan tahun 2020 pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Beberapa masalah yang perlu diperbaharui antara lain adalah : (i) Bawaslu Provinsi Kalsel harus lebih adaptif dalam menghadapi bencana non alam lainnya selain virus corona, (ii) pemberian informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat (iii) penyebaran informasi yang lebih meluas sehingga dapat diketahui oleh setiap elemen di masyarakat.